

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO SE-JAWA TENGAH**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah  
Surakarta**

**Disusun oleh:**

**AGUNG SANDI PUTRA  
B 200090288**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

**“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP**

**PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO SE-JAWA TENGAH”**

Yang disusun dan dipersiapkan oleh :

**AGUNG SANDI PUTRA**

**B200 090 288**

Penanda tangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 24 Desember 2014

Co.Pembimbing

Pembimbing



(Eny Kusumawati, SE, Ak)



(Drs. Suyatmin, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, Msi)

## ABSTRAKSI

Risiko akan terjadi apabila ada kegagalan dalam pelaksanaan tujuan pemerintah daerah. Kegagalan tersebut terjadi karena tujuan dan misi pemerintah daerah tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *risk management disclosure*.

Penelitian ini termasuk penelitian *explanatory research* yang menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* terhadap pemerintah daerah dengan Laporan Hasil Pengauditan (LHP) tahun 2008-2010 dimana LHP tersebut berisi LKPD tahun 2008-2010. Obyek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota se-jawa tengah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19. Data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi berganda untuk mengetahui hipotesisnya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh *risk management disclosure* terhadap pemerintah kabupaten dan kota se-jawa tengah melalui variabel *ukuran, umur, PAD, perbedaan fungsional, kemandirian, dan leverage*. Hasil koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dengan variabel *umur, perbedaan fungsional dan leverage* berpengaruh terhadap *risk management disclosure*, sedangkan variabel *ukuran, PAD, dan kemandirian* tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

Kata kunci : risiko, karakteristik pemerintah daerah, manajemen risiko, *stakholder*.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktivitas dari sebuah organisasi pasti akan berubah dan berkembang seiring dengan perubahan di lingkungan internal dan eksternalnya. Salah satu hasil dari perubahan aktivitas tersebut adalah risiko. Risiko akan terjadi apabila ada kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, misalnya tujuan dan misi dari organisasi tidak akan tercapai. Kegagalan tercapainya tujuan dan misi bagi organisasi publik dapat mengakibatkan *distrust* (ketidakpercayaan) dari publik atas pelayanan yang diberikan (Ampri, 2006).

Kerangka manajemen risiko melibatkan beberapa proses, diantaranya adalah: (1) manajemen risiko merupakan identifikasi kehati-hatian dan penilaian atas risiko yang akan dihadapi, (2) perumusan model atau strategi untuk menangkal risiko, dan (3) monitoring dan pemeriksaan menyangkut segala tindakan dan model yang dilakukan. Manajemen risiko menurut Ampri (2006) dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi.

Perkembangan manajemen risiko sektor publik di Indonesia memang belum seperti pada sektor privat, tetapi pemerintah sudah melangkah ke arah tersebut (Ampri, 2006). Wacana tentang manajemen risiko mulai muncul sejak manajemen risiko dijadikan sebagai salah satu program utama dari strategi dan kebijakan Departemen Keuangan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 464/KMK.01/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (*Road-map* Departemen Keuangan) tahun 2005-2009 yang berisi tentang penerapan manajemen risiko pada lingkup

Kemenkeu.

Penelitian ini memilih objek pemerintah daerah, karena semakin besarnya tuntutan dari *stakeholder* mengenai kepastian risiko yang ditanggung oleh *stakeholder* pada sektor publik utamanya pemerintah daerah. Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO SE-JAWA TENGAH”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
2. Menguji apakah umur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
3. Menguji apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
4. Menguji apakah perbedaan fungsional pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
5. Menguji apakah kemandirian pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
6. Menguji apakah *leverage* pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Manajemen Risiko

Risiko Menurut Amran *et al*, 2009 adalah suatu unsur yang tidak terhindarkan dari setiap spekulasi bisnis. Brigham, 2008 mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Risiko (*risk*) menurut ICAEW (2002) adalah situasi dimana terdapat ketidakpastian atas dampak yang akan terjadi, baik keuntungan maupun kerugian.

Berdasarkan pengertian risiko diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kejadian yang dapat mengancam proses pencapaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi. Organisasi tidak dapat menghindari risiko, sehingga perlu melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Langkah-langkah tersebut dinamakan manajemen risiko.

Manajemen risiko menurut Amran *et al*, 2009 adalah proses dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya (atau menangkap kesempatan) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Kerangka kerja manajemen risiko melibatkan proses-proses sebagai berikut (Lajili dan Zeghal, 2005).

- a. Mengidentifikasi, mengukur, dan menilai tipe atau jenis risiko yang mungkin dihadapi perusahaan.
- b. Memilih metode atau tindakan strategis yang tepat untuk mengontrol risiko.
- c. Memonitor dan mengawasi semua tindakan yang direncanakan untuk mengatasi risiko yang mungkin akan dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder Laporan Hasil Pengauditan (LHP) pemerintah kabupaten dan kota se-jawa tengah yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008 sampai 2010.

### **B. Populasi dan Sample Penelitian**

#### **1. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008-2010 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2010, dipilih sebagai populasi penelitian karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 merupakan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun ke-3, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah sudah lebih mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan lebih mampu mengidentifikasi dan melaporkan *risk management disclosure*.

#### **2. Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008-2010.
- b. Mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.
- c. Menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

(keuangan dan non keuangan).

### **C. Data dan Sumber Data**

Data tersebut diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data yang digunakan merupakan Laporan Hasil Pengauditan (LHP) tahun 2008-2010, dimana LHP tersebut berisi LKPD tahun 2008-2010.

### **D. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel**

#### **a. Variabel Independen**

##### **1. Ukuran pemerintah daerah**

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan organisasi (Patrick 2007 dalam Mandasari, 2009). Ukuran pemerintah daerah bisa diukur dengan berbagai cara, yaitu jumlah pegawai, total aset, total pendapatan, dan kapasitas produksi (Damanpour, 1991 dan Mandasari, 2009). Mengacu pada Black et al., 2003 pada penelitian ini ukuran dinilai berdasarkan total aset.

##### **2. Umur pemerintah daerah**

Umur pemerintah daerah dicatat berdasarkan berapa lama pemerintah daerah itu ada. Keberadaan ini mengacu pada *de jure*, yang berarti bahwa pemerintah daerah didirikan atas dasar hukum. *De jure* dipilih karena merupakan bukti yang kuat atas pendirian suatu pemerintah daerah, dalam hal ini berupa Surat Keputusan Direktur Jendral (Yudawijaya, 2010).

##### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah). Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan



kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perhitungan ini mengacu pada penelitian (Yudawijaya, 2010).

#### 4. Perbedaan fungsional

Perbedaan fungsional mengacu pada organisasi dibagi menjadi berapa perbedaan fungsional atau sub unit. Jumlah sub unit dipakai sebagai proksi perbedaan fungsional. Pada penelitian ini perbedaan fungsional diukur berdasarkan jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada pada masing-masing pemerintah daerah, perhitungan ini mengacu pada penelitian (Yudawijaya, 2010).

#### 5. Kemandirian

Kemandirian Pemerintah Daerah diukur Rasio Kemandirian Daerah, yaitu dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman, perhitungan ini didapatkan dari buku Mahmudi, 2007 yang berjudul “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*”.

#### 6. *Leverage*

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09). Hutang Pemerintah Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membayar kembali jumlah uang dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lender (Elmi,

2002). Variabel kewajiban diukur dengan cara membagi kewajiban dengan total aset pemerintah daerah, mengacu pada penelitian (Amran *et al*, 2009).

b. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Masing-masing item diberi nilai 1 apabila diungkapkan dalam laporan keuangan, dan diberi nilai 0 apabila tidak diungkapkan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui skor *risk management disclosure* dihitung persentase jumlah item yang dilaporkan dibagi dengan keseluruhan item (Yudawijaya, 2010) atau dengan rumus:

$$X = \frac{\sum x}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$X$  = Item *risk management disclosure*

$N$  = Total keseluruhan item

**E. Metode Analisis Data**

**1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data (Ghozali, 2006).

**2. Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji normalitas data**

Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variable dengan menggunakan *One-Kolmogorov-Smirnov Test*. Tingkat signifikan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebesar 5 %. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pengujian dua arah dengan membandingkan nilai p. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai p yang didapat lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2009).

#### **b. Uji multikolinearitas**

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terjadi interkorelasi yang tinggi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (*variance inflation factor*) atau *tolerance value*. *Tolerance value* diatas angka 0,1 sedangkan batas VIF adalah 1 (Ghozali, 2009:91).

#### **c. Uji Autokorelasi**

Pengujian dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Cara mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2009).

#### **d. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji masalah heteroskedastisitas digunakan dengan Uji Park dengan kriteria pengujian membandingkan antara nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel. Homokedastisitas ditunjukkan apabila  $t$  hitung variabel independen lebih kecil dari  $t$  tabel. (Ghozali, 2009:105).

### **3. Uji Hipotesis**

#### **a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 - 1. Koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel independen dalam model regresi, sehingga banyak peneliti menganjurkan menggunakan *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2009).

#### **b. Uji Statistik F**

Apabila nilai F hitung hasil regresi < nilai F tabel, maka  $H_0$  tidak ditolak. Tetapi apabila nilai F hitung hasil regresi > nilai F tabel, maka  $H_A$  diterima (Ghozali, 2009). Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima apabila tingkat signifikansi < 0,05 atau  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_A$  tidak diterima apabila tingkat signifikansi > 0,05.

#### **c. Uji Statistik t**

Apabila nilai t hitung hasil regresi < nilai t tabel, maka  $H_0$  tidak ditolak. Sebaliknya jika nilai t hitung hasil regresi > nilai t tabel, maka  $H_A$  diterima (Ghozali, 2009). Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima apabila tingkat signifikansi < 0,05 atau  $H_0$  tidak ditolak dan  $H_A$  tidak diterima apabila tingkat signifikansi > 0,05.

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Pengumpulan Data

#### 1. Deskripsi Sampel

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 19 LKPD atau 18,05% dari keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota (95). Sampel terdiri dari LKPD di seluruh Wilayah Jawa Tengah yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, bukan berdasarkan lokasi. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, mendapat opini wajar pengecualian atau tanpa pengecualian dan mengandung semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel IV.1  
Sampel Penelitian

LKPD yang berhasil diunduh dari BPK	95
LKPD yang mendapat opini <i>disclaimer</i> maupun tidak wajar	30
LKPD yang tidak menyediakan data Umur, Jumlah SKPD maupun yang CALKnya tidak lengkap	35
Data <i>Outlier</i>	—11
Sampel	19

Sumber: BPK RI, Lampiran 1

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive* sampling. Pemerintah daerah yang menjadi sampel adalah pemerintah daerah yang memenuhi beberapa kriteria tertentu yang sudah dijelaskan di Bab III.

#### 2. Statistik Deskriptif

Memaparkan statistik deskriptif variabel independen yang meliputi variabel Ukuran, Umur, PAD, Perbedaan Fungsional, Kemandirian dan *Leverage*.

#### Statistik Deskriptif

VARIABEL	MEAN	MAX	MIN
UKURAN	2,1952E6	5,12E6	1,27E5
UMUR	58,7895	60,00	58,00
PAD	9,6170E4	6,86E5	26677,00
PERB.FUNG	66,5789	179,00	29,00
MANDIRI	0,2342	1,29	0,02
LEVERAGE	0,0061	0,03	0,00
RISK	0,2808	0,50	0,17

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Variabel ukuran diukur berdasarkan jumlah aset. Nilai rerata ukuran adalah Rp 2.333.669.67 Total aset terbesar dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki total aset sebesar Rp 5.433.972 .Pemerintah daerah yang memiliki total aset terkecil adalah Pemerintah Kota Salatiga dengan nilai Rp 127.495 . Terdapat 12 atau 40% pemerintah daerah yang memiliki nilai aset diatas nilai rerata.

Variabel umur diukur berdasarkan umur pemerintah daerah dimulai dari awal dibentuk sesuai peraturan pemerintah sampai dengan tahun sampel laporan keuangan. Rerata umur adalah 58,967. Terdapat 21 atau 70% pemerintah daerah yang mengungkapkan *risk management disclosure* memiliki umur diatas 58,967 tahun.

Variabel PAD diukur berdasarkan jumlah PAD. Nilai rerata PAD adalah Rp 85.896,167. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah PAD diatas rerata berjumlah 6 pemerintah daerah atau 20%. Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2008 memiliki jumlah PAD paling tinggi yaitu Rp 686.308, sedangkan jumlah PAD terendah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2010 dengan jumlah PAD Rp 26.677.

Variabel Perbedaan Fungsional diukur berdasarkan jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan. Rerata perbedaan fungsional adalah 61,6 SKPD. Terdapat 7 atau 23,33% pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD diatas 61,6 SKPD. Jumlah SKPD terbanyak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2009 dengan jumlah 179 SKPD. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2009 memiliki jumlah SKPD paling sedikit yaitu 21 SKPD.

Kemandirian diukur berdasarkan nilai rasio kemandirian. Nilai rerata kemandirian adalah 0,198. Terdapat 5 atau 16,67% pemerintah daerah yang memiliki angka rasio kemandirian diatas angka rasio rerata. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki angka rasio kemandirian paling tinggi, yaitu sebesar 1,293.

*Leverage* diukur berdasarkan jumlah kewajiban dibagi aset. Rerata *Leverage* adalah 0,004. Terdapat 7 atau 23,33% pemerintah yang memiliki nilai *leverage* diatas nilai rerata. Nilai *leverage* paling tinggi dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal 2008 dengan nilai *leverage* 0,026.

## **B. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Normalitas**

Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2009). Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut.

### One-Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		19
Normal parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,05442555
Most Extreme Difference	Absolute	0,094
	Positive	0,090
	Negative	-0,094
Kolmogorov-Smirnov Z		0,411
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,996

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,411 dan probabilitas yang signifikan sebesar 0,996 jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi normalitas.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan nilai VIF dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
UKURAN	0,752	1,329
UMUR	0,812	1,232
PAD	0,263	3,809
PERB_FUNGS	0,896	1,116
MANDIRI	0,245	4,086
LEVERAGE	0,437	2,289

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel dalam



penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan semua variabel memiliki nilai VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen (Ghozali, 2009).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan bahwa variabel pengganggu suatu observasi berkorelasi dengan variabel pengganggu pada observasi lainnya. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut.

Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00873
Cases < Test Value	9
Cases >= Test Value	10
Total Cases	19
Number of Runs	6
Z	-1.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Hasil uji autokorelasi menggunakan uji run test di atas menunjukkan nilai z sebesar -1.882 dan Asymp. Sig. (2-tailed) yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,060 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2009). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dapat dilihat sebagai berikut.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
UKURAN	-1.534	0,151
UMUR	-0.226	0,825
PAD	0,474	0,644
PERB_FUNGS	0,216	0,833
MANDIRI	-1.528	0,153
LEVERAGE	0,585	0,569

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan pada 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan sebagai berikut.

### Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,084 <sup>a</sup>	0,079	0,564	0,06666

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,564 atau 56,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa 56,4% perubahan pengungkapan *risk management disclosure* dipengaruhi oleh variabel ukuran, umur, PAD, perbedaan fungsional, kemandirian dan *leverage*, sedangkan sisanya, yaitu 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

#### b. Nilai F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (*goodness of fit model*). Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji F (*F test*). Adapun hasil pengujian secara simultan adalah sebagai berikut.

#### Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,130	6	0,022	4,874	0,010 <sup>a</sup>
Residual	0,053	12	0,004		
Total	0,183	18			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Nilai F regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F menunjukkan nilai sebesar 4,874 dengan signifikansi sebesar 0.010. Nilai F memberikan hasil yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran, umur, PAD, perbedaan fungsional, kemandirian, dan *leverage* berpengaruh terhadap

*risk management disclosure*.

c. Nilai t

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Nilai t) dan besarnya nilai signifikansi dapat dilihat sebagai berikut.

Uji Regresi Berganda

Variabel	Beta	T	Sig.
(Constant)		-2,287	0,041
UKURAN	-0,249	-1,390	0,190
UMUR	0,451	2,607	0,023
PAD	-0,421	-1,385	0,191
PERB_FUNGS	-0,520	-3,161	0,008
MANDIRI	0,172	0,546	0,595
LEVERAGE	-0,819	-3,475	0,005

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Pengujian hipotesis 1

Untuk mengetahui apakah ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*.

Hasil output SPSS menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel ukuran adalah 0,190. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran berpengaruh terhadap pengungkapan *risk management disclosure*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> ditolak.

Pengujian hipotesis 2

Untuk mengetahui apakah umur organisasi berpengaruh positif terhadap

*risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*

Hasil output SPSS menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel Umur adalah 0,023. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 0,1. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel Umur berpengaruh terhadap pengungkapan *Risk Management Disclosure*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> diterima.

### Pengujian Hipotesis 3

Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : PAD pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*

Hasil output SPSS menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel PAD adalah 0,191. Nilai probabilitas tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian 0,1. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *risk management disclosure* tetapi tidak pada level signifikansi 1%, 5% dan 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> ditolak.

### Pengujian hipotesis 4

Untuk mengetahui apakah Perbedaan fungsional berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Perbedaan fungsional pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*

Dengan menggunakan analisis Regresi pada tingkat signifikansi 5%, variabel perbedaan fungsional menunjukkan tingkat signifikansi 0,008 dan beta koefisien negatif sehingga H<sub>4</sub> diterima.

#### Pengujian hipotesis 5

Untuk mengetahui apakah kemandirian organisasi berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>5</sub> : Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*

Hasil output SPSS menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel Kemandirian keuangan adalah 0,595. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel Kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan *risk management disclosure* tetapi tidak pada signifikansi 1%, 5% dan 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>5</sub> ditolak.

#### Pengujian hipotesis 6

Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>6</sub> : *Leverage* pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*

Nilai probabilitas variabel kewajiban sebesar 0,005. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel kewajiban berpengaruh terhadap

pengungkapan *risk management disclosure* tetapi pada level signifikansi 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_6$  diterima.

## Daftar Pustaka

- Abraham, S dan P. Cox. 2007. "Analyzing The determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports." *British Accounting Review*. Vol. 39. No.3. PP. 227-248.
- Aljifri, Khaled dan Khaled Hussainey. 2007. "The Determinant of Forward Looking Information in Annual Reports of UAE." *International bussiness Review*. Vol. 16. No.1. PP. 1-26.
- Amran, Azlan, Abdul Manaf Rosli Bin dan Bin Che Haat Mohd Hassan. 2009. "Risk Reporting An Explanatory Study on Risk management Disclosure in Malaysian Annual Reports." *Managerial Auditing Journal*. Vol 24. No.1. PP. 39-57.
- Bastian, Indra, 2006. "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar." Jakarta. Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2009. "Ekonometrika." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra, Sigit Lesmana. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia." *Tesis FE Universitas Negeri Sebelas Maret*.
- Mandasari, Putriesti. 2009. "Practice of Mandatory Disclosure Compliance, In Indonesian Local Government." *Tesis FE UNS*.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
- , 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 04.
- Yudawijaya, Yogy Budi. 2010. Praktik *Risk Management Disclosure* Pada Pemerintah Daerah. Tesis Magister Akuntansi FE UNS-Tidak Dipublikasi.
- Yunanto. 2010. "Intellectual Capital Disclosure dan Karakteristik Pemerintah di Indonesia." *Tesis FE Universitas Negeri Sebelas Maret*.